

“

Dua peristiwa penting di tahun 2008 yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap perbankan Indonesia secara nasional adalah krisis perekonomian global dan kondisi likuiditas yang relatif ketat. ”

Developments in the domestic banking industry throughout 2008 were significantly affected by two main issues, namely the global economic crisis and tight liquidity in the banking system.

Erry Riyana Hardjapamekas
Komisaris Utama/Komisaris Independen
President Commissioner/Independent Commissioner



Krisis perekonomian global bagi Indonesia telah mengakibatkan menurunnya ekspor, dan lebih lanjut berdampak pada menjadi lesunya kegiatan di sektor riil. Kelesuan di sektor riil akan berdampak pada kemungkinan menurunnya kinerja keuangan para nasabah pengguna pembiayaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Risiko yang dihadapi perbankan dari kondisi seperti tersebut diantaranya adalah, potensi meningkatnya kredit/pembiayaan menjadi tidak atau kurang produktif, yang biasa disebut sebagai *Non Performing Loan* (NPL).

Peningkatan NPL mempunyai setidaknya dua sisi yang kurang menguntungkan, yaitu berkurangnya pendapatan secara efektif dari pembiayaan, dan meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memupuk cadangan kemungkinan kerugian yang disebut PPAP.

Tekanan-tekanan yang timbul dari gejolak makro telah mengakibatkan terjadinya pergeseran secara tajam berbagai keadaan dari yang semula diasumsikan, diantaranya pada tingkat inflasi, harga minyak bumi dan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang luar negeri. Diajukannya usul revisi APBN oleh Pemerintah kepada DPR pada akhir Januari 2009 menunjukkan suatu gambaran mengenai tidak ringannya keadaan yang dihadapi.

Mengikuti perkembangan pasar modal yang menurun sejak Agustus 2008, serta inflasi yang meningkat menjadi dua digit per Mei 2008, Bank Indonesia mulai bulan tersebut secara bertahap menaikkan kembali BI Rate, yang pada Oktober/November menjadi sebesar 9,5%. Semula, sejak Desember 2007 *BI Rate* telah turun dan bertahan pada tingkat 8,0% sampai dengan akhir April/awal Mei 2008. Sementara itu, dalam upaya menertibkan pengelolaan dana-dana milik berbagai Departemen, Pemerintah telah melakukan penarikan sementara dana-dana yang ditempatkan pada perbankan.

Kejadian sebagaimana diutarakan di atas berdampak pada ketatnya ketersediaan likuiditas perbankan dan lebih jauh meningkatkan biaya dana yang harus dipikul.

Kemungkinan terjadinya kondisi yang kurang menguntungkan tahun 2008 disadari oleh manajemen dengan melakukan langkah antisipatif yang diperlukan, yang pada dasarnya merupakan langkah lanjutan dari kebijakan yang sudah dirintis tahun sebelumnya, dalam bentuk antara lain usaha meningkatkan:

- a. Cadangan untuk NPL menjadi 101,0%, naik dari tahun sebelumnya dengan cadangan sebesar 71,9%.
- b. Pendapatan non kredit dan non bunga, serta efisiensi pendapatan dan biaya, yang hasilnya tercermin pada rasio-rasio keuangan bersangkutan yang membaik dibandingkan hasil tahun sebelumnya.

The immediate impact of the global economic crisis for Indonesia was the decline in the country's export performance, followed later on by a slowdown in the real sector of the economy. The slowdown will eventually affect the financial performance of those customers making use of financing facilities provided by banks and other financial institutions. Consequently, banks are now facing greater risk of non-performing loans (NPL) occurring in their loan and financing portfolios.

The increase in NPLs has at least two adverse consequences. First there will be effective reduction in income from financing facilities extended and secondly, there must be increased provisioning set aside to cover potential losses on earning assets.

Pressures from developments in the macro economy have necessitated some quite drastic changes in previous assumptions, including the inflation rate, crude oil prices and the Rupiah exchange rate against foreign currencies. Among signs of the severity of the condition was the revised draft of the State Budget submitted in late January 2009 by the Government of Indonesia for approval by the House of Representatives.

In line with the declining performance of the capital market since August 2008 and to counter inflation that has climbed to double-digit figures since May 2008, Bank Indonesia has progressively increased its benchmark rates. Whereas the BI Rate had previously come down to 8.0% in December 2007, it was then raised in stages beginning in May 2008 until it reached 9.5% in October and November of 2008. Meanwhile in an effort to exercise greater control over the management of funds by the various government ministries and agencies, the Government of Indonesia has temporarily withdrawn its funds previously placed in the banking system.

These turns of events have resulted in tight liquidity within the banking system as well as creating a higher cost of funds for banks.

Early on, the Management of BNI anticipated these unfortunate developments and took the necessary proactive measures. Basically, these were a continuation and improvement over various policies initiated in the previous year, and included:

- a. Increasing the loss allowance coverage ratio on NPLs to 101.0% from the previous year's level at 71.9%
- b. Focusing more on non-interest and non-loan related income, as well as more efficient cost and revenue structure, as shown by the improvements in various related financial ratios as compared to the previous year.

Dengan langkah dan kebijakan antisipatif tersebut maka BNI mampu mempertahankan kualitas aset, dengan rasio NPL bruto tidak melampaui maksimum 5,0%, bahkan NPL netto turun dari tahun lalu sebesar 4,0% menjadi 1,7%.

Usaha meningkatkan kualitas aset ini, meskipun sebagian berupa penghapusbukuan pinjaman sebesar Rp 4,2 triliun yang didukung dengan cadangan yang telah diperkuat, tetapi juga tidak terlepas dari hasil penyelesaian NPL dan PSB sebesar Rp 764 miliar.

Hasil-hasil kuantitatif tersebut dicapai dengan disertai berbagai usaha perbaikan dan penyempurnaan sistem manajemen secara umum, pelayanan nasabah, organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan serta pemanfaatan teknologi.

Dewan Komisaris pada kesempatan ini menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Direksi, segenap pegawai, nasabah, serta para pemangku kepentingan BNI, yang tanpa kerja keras dan dukungan bersama, sangat sulit untuk mencapai hasil sebagaimana dikemukakan di atas.

Prediksi tahun 2009 dan tahun-tahun berikutnya diperkirakan merupakan masa-masa yang semakin sulit. Dewan Komisaris mengharapkan agar kerja keras manajemen dan segenap pegawai serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, dapat dilanjutkan secara sistematis, dan ditingkatkan.

Jakarta, April 2009



Erry Riyana Hardjapamekas

Komisaris Utama/Komisaris Independen

President Commissioner/Independent Commissioner

As a result of these anticipatory measures, BNI was able to maintain the quality of its loan portfolio, with a gross NPL below the mandatory maximum level of 5.0% while net NPL ratio improved to 1.7% from 4.0% in the previous year.

In addition to increasing the loss allowance coverage as described above the Bank moved to improve earning assets quality by facilitating loan write-offs amounting to Rp 4.2 trillion and settlement and recovery of NPLs and PSBs amounting to Rp 764 billion.

Alongside these quantitative achievements, BNI also succeeded in improving and enhancing its management systems as a whole, as well as aspects of customer service, organization, human resources, management, control and supervision and technology utilization.

The Board of Commissioners would like to take this opportunity to thank the Board of Directors, employees, customers and other stakeholders of BNI. The achievements described above would not have been possible without their support and dedicated hard work.

In 2009 and beyond, most predictions point to more challenging and difficult times ahead. The Board of Commissioners therefore expects the Management and staff of BNI to continue to systematically improve their performance through hard work with the continuing support of all stakeholders.